

Eksistensi Influencer dan Buzzer dalam Fenomena Golput Pada Masa Pemilu

Muhammad Zuhdan (1), Nisa Dwi Enitasari (2)

(1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

(2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: mzuhdan@amikom.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji peran aktor media sosial dalam fenomena golongan putih (golput) pada pemilihan umum di Indonesia. Dalam era digital, aktor-aktor ini berfungsi sebagai pembentuk opini publik yang berpengaruh, terutama dalam konteks perilaku pemilih. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan analisis konten media sosial dan wawancara mendalam untuk memahami bagaimana aktivitas mereka mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor media sosial, termasuk influencer dan buzzer, memiliki dampak signifikan dalam menyebarkan informasi dan membentuk persepsi tentang pemilu. Pengaruh ini dapat mendorong atau mengurangi perilaku golput, baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara media sosial, pembentukan opini publik, dan partisipasi politik di era digital. Studi ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan pelaku demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini membuka jalan bagi studi lebih lanjut mengenai dinamika partisipasi politik di era media sosial.

Kata kunci: Influencer, Buzzer, Golput.

Abstract:

This study examines the role of social media actors in the phenomenon of white groups (golput) in general elections in Indonesia. In the digital era, these actors function as influential public opinion shapers, especially in the context of voter behavior. The study uses a qualitative approach, combining social media content analysis and in-depth interviews to understand how their activities influence people's decisions not to participate in elections. The results show that social media actors, including influencers and buzzers, have a significant impact on disseminating information and shaping perceptions about elections. This influence can encourage or reduce golput behavior, either directly or indirectly. These findings highlight the complexity of the relationship between social media, the formation of public opinion, and political participation in the digital age. This study provides valuable insights for policymakers, election organizers, and democracy actors to increase voter participation and strengthen the integrity of the democratic process in Indonesia. In addition, this research paves the way for further studies on the dynamics of political participation in the era of social media.

Keywords: Influencer, Buzzer, Golput

Article History:

Received; 01-10-2024; Revised; 22-11-2024; Accepted; 20-12-2024



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Fenomena golput atau golongan putih telah menjadi bagian integral dari lanskap politik Indonesia sejak era Orde Baru¹. Istilah ini merujuk pada pilihan sadar seseorang untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Kemunculan golput di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah serta dinamika sosial-politik yang kompleks. Akar fenomena golput dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pemilu sering kali dianggap sebagai formalitas belaka tanpa substansi demokrasi yang sejati. Pada masa itu, masyarakat mulai merasakan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Momen demokrasi ini dianggap hanya sebagai alat legitimasi bagi rezim yang berkuasa, tanpa memberikan kesempatan nyata bagi rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara.

Adanya fenomena realitas yang terjadi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi menjadi alasan Golput ini. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem multipartai dan pemilihan langsung, banyak warga negara masih merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak signifikan terhadap perubahan yang diinginkan. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan elite politik juga menjadi faktor penting dalam menguatnya fenomena golput. Janji-janji kampanye yang tidak terealisasi, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, serta kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat semakin memperdalam skeptisisme masyarakat terhadap proses demokrasi. Bagi sebagian orang, golput menjadi bentuk protes diam terhadap sistem yang dianggap gagal mewakili aspirasi kelompok ini². Faktor lain yang turut menyumbang pada meningkatnya angka golput adalah kurangnya pendidikan politik yang memadai di kalangan masyarakat. Banyak warga negara, terutama di daerah-daerah terpencil atau tingkat pendidikan rendah, tidak memahami sepenuhnya arti penting dari partisipasi mereka dalam pemilu. Ketidaktahuan ini, ditambah dengan apatis politik, membuat mereka memilih untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan.

Fenomena golput juga dapat dilihat sebagai cerminan dari kegagalan partai politik dan kandidat dalam menawarkan visi dan program yang menarik bagi pemilih. Banyak masyarakat merasa bahwa pilihan yang tersedia dalam pemilu tidak mewakili aspirasi mereka, sehingga memilih untuk abstain menjadi opsi yang dianggap paling rasional. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa motivasi di balik golput sangatlah beragam³. Tidak semua orang yang tidak memilih dapat dikategorikan sebagai golput ideologis. Ada pula faktor-faktor teknis seperti kendala geografis, keterbatasan akses ke tempat pemungutan suara, atau masalah administratif yang menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Fenomena golput di Indonesia terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan⁴. Ada yang memandangnya sebagai ancaman terhadap legitimasi demokrasi, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk ekspresi politik yang sah. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, keberadaan golput telah menjadi indikator penting dalam

¹ Jamaludin Ghafur, 'Peran Partai Politik Dalam Pemilu (Telaah Atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Dan Rekrutmen Politik)'.

² R. Dhanny Susetyawidianta and Galang Gerald, 'Political Branding Prabowo - Gibran Dalam Pemilu Presiden 2024: Analisa Interaksionisme Simbolik Di Media Sosial Instagram Dan Twitter'.

³ Jamaludin Ghafur, 'Peran Partai Politik Dalam Pemilu (Telaah Atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Dan Rekrutmen Politik)'.

⁴ Anggraini and Ariesta, 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019', 2022.



mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memiliki peran ganda dalam konteks ini⁵. Di satu sisi, kemudahan akses informasi seharusnya dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun di sisi lain, penyebaran berita palsu dan kampanye hitam justru sering kali menimbulkan kebingungan dan keengganan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi disisi lain perkembangan teknologi ini justru menjadi sarana menghindar golput.

Lanskap politik kontemporer menjadikan media sosial sebagai kekuatan yang tak terbendung, mengubah secara fundamental cara politisi berkomunikasi dengan konstituen mereka dan bagaimana warga negara berinteraksi dengan proses politik. Fenomena ini erat kaitannya dengan perkembangan golput di Indonesia, menciptakan dinamika baru dalam partisipasi politik dan pembentukan opini publik. Media sosial, dengan jangkauannya yang luas dan sifatnya yang interaktif, telah membuka ruang diskusi politik yang lebih demokratis dan terbuka⁶. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan politisi untuk langsung menyapa pemilih tanpa perantara media tradisional. Hal ini menciptakan ilusi kedekatan dan akses langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik modern.

Kemudahan akses ini juga membawa tantangan tersendiri. Informasi politik yang beredar di media sosial seringkali tidak terverifikasi, menciptakan lanskap informasi yang kompleks dan membingungkan. Fenomena "*echo chamber*" dan "*filter bubble*" di media sosial cenderung menguatkan pandangan yang sudah ada, alih-alih mendorong dialog konstruktif antar berbagai perspektif politik⁷. Situasi ini dapat memperparah polarisasi politik dan, ironisnya, justru mendorong sebagian orang untuk menarik diri dari proses politik formal, memperkuat fenomena golput. Di sisi lain, media sosial juga telah menjadi wadah bagi gerakan akar rumput dan aktivisme digital. Kampanye-kampanye politik berbasis media sosial telah berhasil memobilisasi dukungan dan sumber daya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini memberi harapan baru bagi partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung apatis terhadap politik konvensional.

Kemudahan menyebarkan informasi di media sosial juga membuka peluang bagi manipulasi opini publik. Fenomena "*fake news*" dan disinformasi telah menjadi ancaman serius bagi integritas proses demokratis⁸. Banjir informasi yang tak terkendali ini dapat membuat pemilih merasa kewalahan dan skeptis, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk memilih golput sebagai bentuk protes atau ketidakpercayaan terhadap sistem⁹. Dalam konteks Indonesia, peran media sosial dalam politik kontemporer menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan dengan realitas golput. Di satu sisi, media sosial menawarkan platform bagi politisi dan aktivis untuk mengedukasi dan memobilisasi pemilih, khususnya generasi muda yang sering diasosiasikan dengan tingginya angka golput. Kampanye-kampanye kreatif di media

⁵ Hidayat, 'Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum'.

⁶ Astuti and Zubaedah, 'KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA'RUF'.

⁷ Julianja, 'Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'.

⁸ Hatta, 'The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences'.

⁹ Al-Fatih and Aditya, 'Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System'.



sosial telah berhasil menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda.

Di sisi lain, sifat media sosial yang cenderung mempolarisasi dapat memperkuat sikap apatis dan skeptis terhadap proses politik. Perdebatan yang sering kali tidak produktif dan cenderung emosional di platform media sosial dapat membuat sebagian orang merasa lelah dengan politik dan memilih untuk menarik diri dari partisipasi aktif, termasuk dalam pemilihan umum. Media sosial juga telah mengubah cara golput dimanifestasikan dan dipahami. Jika sebelumnya golput sering dilihat sebagai sikap pasif, kini media sosial memungkinkan ekspresi golput yang lebih aktif dan vokal. Hashtag dan kampanye daring yang mengajak untuk tidak memilih atau memboikot pemilu menjadi fenomena baru yang menantang pemahaman tradisional tentang partisipasi politik¹⁰.

Fakta yang ada bahwa media sosial telah menciptakan bentuk partisipasi politik baru yang berada di luar kerangka formal pemilihan umum. "*Slacktivism*" atau aktivisme daring yang low-effort seperti menandatangani petisi online atau menyebarkan hashtag, menjadi alternatif bagi mereka yang merasa tidak puas dengan saluran partisipasi politik konvensional. Fenomena ini menambah kompleksitas dalam memahami dan mengatasi isu golput di era digital. Tantangan bagi para pemangku kepentingan politik di Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi media sosial untuk meningkatkan partisipasi politik yang substantif, sambil memitigasi dampak negatifnya. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan literasi digital dan politik di kalangan masyarakat, serta menciptakan ruang-ruang dialog yang lebih konstruktif di platform digital.

Maka peran media sosial dalam politik kontemporer Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena golput, mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam cara masyarakat berinteraksi dengan sistem demokrasi¹¹. Media sosial telah menjadi arena baru bagi kontestasi ide dan mobilisasi politik, namun juga menjadi cermin yang memantulkan kompleksitas dan tantangan demokrasi di era digital. Mengelola dinamika ini dengan bijak akan menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik Indonesia telah menyaksikan kemunculan aktor-aktor baru yang memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi diskursus politik. Fenomena ini ditandai dengan hadirnya influencer dan buzzer politik yang memanfaatkan platform media sosial sebagai panggung utama mereka. Kehadiran mereka telah mengubah dinamika komunikasi politik dan cara kampanye dijalankan, menciptakan dimensi baru dalam interaksi antara politisi, partai politik, dan masyarakat.

Influencer politik, yang sering kali berasal dari kalangan selebritas, tokoh publik, atau individu dengan jumlah pengikut yang besar di media sosial, telah menjadi jembatan antara dunia politik yang seringkali dianggap rumit dengan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dicerna oleh publik luas¹². Influencer politik memiliki kemampuan untuk menyederhanakan isu-isu kompleks dan menyajikannya dalam format yang menarik dan mudah dipahami, seperti

¹⁰ Ahmad et al., *Manajemen Komunikasi Politik Dan Marketing Politik*.

¹¹ Wisnaeni and Herawati, 'The Politics of Law of Pancasila-Based Democracy in Indonesia as the World's Third Largest Democracy'.

¹² Rizki and Kurniawan, 'Public Service Performance'.



meme, video pendek, atau postingan yang viral. Kehadiran mereka telah membuat politik menjadi lebih aksesibel bagi generasi muda yang mungkin sebelumnya merasa teralienasi dari wacana politik tradisional. Di sisi lain, fenomena buzzer politik menambah lapisan kompleksitas dalam ekosistem politik digital Indonesia. Buzzer, yang dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang secara aktif mempromosikan agenda politik tertentu di media sosial, seringkali beroperasi dalam skala yang lebih besar dan terorganisir¹³. Influencer politik memiliki kemampuan untuk menciptakan tren, mendorong narasi tertentu, dan bahkan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik yang sedang hangat diperbincangkan.

Munculnya influencer dan buzzer sebagai aktor politik baru ini tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Dengan penetrasi internet dan smartphone yang semakin luas, media sosial telah menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang, terutama generasi milenial dan Gen Z¹⁴. Dalam konteks ini, influencer dan buzzer menjadi figur yang memiliki otoritas baru dalam membentuk opini dan menyebarkan informasi politik.

Fenomena ini juga membawa sejumlah tantangan dan risiko. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyebaran dezinformasi dan manipulasi opini publik. Influencer dan buzzer, dengan jangkauan dan pengaruh mereka yang luas, memiliki kapasitas untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja menyesatkan demi kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengancam integritas proses demokrasi dan memperkeruh suasana politik yang sudah sarat dengan polarisasi. Adanya kehadiran influencer dan buzzer politik telah mengaburkan batas antara hiburan dan politik, antara fakta dan opini. Konten politik yang dikemas dalam format menghibur atau sensasional dapat menarik perhatian lebih banyak orang, namun juga berisiko mereduksi kompleksitas isu-isu penting menjadi sekadar tontonan yang dangkal. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas diskursus politik dan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang informasi dan rasional.

Fenomena keberadaan influencer dan buzzer ini juga dapat dilihat sebagai demokratisasi ruang politik¹⁵. Influencer dan buzzer telah membuka jalur baru bagi partisipasi politik warga negara biasa, yang mungkin sebelumnya merasa tidak memiliki suara dalam proses politik formal. Mereka telah menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan interaktif, di mana isu-isu politik dapat didiskusikan secara lebih terbuka dan melibatkan spektrum masyarakat yang lebih luas¹⁶. Bagi partai politik dan politisi, kemunculan influencer dan buzzer telah mengubah strategi kampanye dan komunikasi politik mereka. Mereka kini harus beradaptasi dengan lanskap media yang baru ini, belajar untuk berkomunikasi dalam bahasa dan format yang lebih sesuai dengan *platform* digital. Hal ini telah mendorong inovasi dalam kampanye politik, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang autentisitas dan substansi pesan politik yang disampaikan.

¹³ Nurul Jannah Lailatul Fitria, 'Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik'.

¹⁴ Sugiono, 'Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia'.

¹⁵ Sastramidjaja, Rasidi, and Elsitra, 'Peddling Secrecy in a Climate of Distrust: Buzzers, Rumours and Implications for Indonesia's 2024 Elections'.

¹⁶ Amalia, Esti, and Camil, 'THE INDUSTRY OF POLITICAL BUZZING IN INDONESIA AND ITS IMPACT ON SOCIAL MEDIA GOVERNANCE'.



Hal tersebut juga telah menarik perhatian regulator dan pembuat kebijakan. Pertanyaan tentang bagaimana mengatur aktivitas influencer dan buzzer politik, terutama dalam konteks kampanye pemilu, menjadi isu yang semakin mendesak. Bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi di media sosial dengan kebutuhan untuk melindungi integritas proses demokrasi menjadi tantangan baru dalam tata kelola pemilu di era digital. Maka munculnya influencer dan buzzer sebagai aktor baru dalam lanskap politik Indonesia mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam cara masyarakat berinteraksi dengan politik di era digital. Fenomena ini membawa potensi untuk merevitalisasi partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda, namun juga menghadirkan risiko dan tantangan baru yang harus diatasi. Bagaimana masyarakat dan institusi politik merespons dan beradaptasi dengan realitas baru ini akan sangat menentukan kualitas dan karakter demokrasi Indonesia di masa depan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih nuansir tentang bagaimana influencer dan buzzer memengaruhi diskursus politik dan sikap terhadap golput di Indonesia. Temuan ini dapat memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan partisipasi demokratis dan memitigasi dampak negatif dari manipulasi opini publik di media sosial. Maka untuk menganalisa kaitan antara keberadaan buzzer dan influencer dengan fenomena golput ini selanjutnya akan dirangkam dalam peneitian yang berjudul "Eksistensi Influencer dan Buzzer Dalam Fenomena Golput pada Masa Pemilu".

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan tema "Eksistensi Influencer dan Buzzer Dalam Fenomena Golput pada Masa Pemilu", pendekatan kualitatif akan sangat sesuai karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks ini. Metode penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan konteks Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris'.yang memengaruhi peran influencer dan buzzer dalam kaitannya dengan perilaku golput. Desain penelitian yang diusulkan adalah studi kasus, yang akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena ini secara menyeluruh dalam konteks nyata. Studi kasus ini akan berfokus pada periode menjelang dan selama pemilu, dengan mengamati aktivitas influencer dan buzzer serta dampaknya terhadap sikap pemilih terhadap golput.

Pengumpulan data akan melibatkan beberapa metode untuk memastikan triangulasi dan meningkatkan validitas penelitian melalui analisis konten media sosial akan dilakukan untuk memeriksa narasi dan strategi yang digunakan oleh influencer dan buzzer dalam membahas isu-isu terkait pemilu dan golput. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok akan menjadi fokus utama, mengingat popularitasnya di Indonesia. Peneliti akan menggunakan alat analisis media sosial untuk melacak hashtag tertentu, menganalisis sentimen, dan mengidentifikasi pola dalam konten yang dibagikan. Selain itu mealui observasi partisipan online akan dilakukan, di mana peneliti akan menganalisa diskusi politik di platform seperti instagram atau Facebook. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pesan-pesan dari influencer dan buzzer disebarkan dan didiskusikan di kalangan pemilih. Selain itu, peneliti akan melakukan analisis dokumen, termasuk laporan media, pernyataan resmi dari badan



pemilihan umum, dan literatur akademis yang relevan tentang perilaku pemilih dan pengaruh media sosial dalam politik¹⁷.

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory*¹⁸ akan digunakan. Metode ini melibatkan pengkodean terbuka data yang dikumpulkan, diikuti oleh pengkodean aksial untuk mengidentifikasi kategori dan hubungan antar tema. Proses ini akan iteratif, dengan pengumpulan dan analisis data yang berlangsung secara bersamaan, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian sesuai dengan temuan yang muncul. Dengan pendekatan kualitatif yang komprehensif ini, penelitian akan memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang dinamika politik kontemporer di era digital, khususnya dalam konteks Indonesia yang unik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Influencer

Lanskap politik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan munculnya influencer politik sebagai aktor baru yang memainkan peran penting dalam membentuk opini public¹⁹. Fenomena ini telah menghadirkan dinamika unik dalam cara informasi politik disebarkan dan diterima oleh masyarakat, termasuk dalam isu sensitif seperti golput atau golongan putih.

Di Indonesia, influencer politik hadir dalam beragam bentuk, masing-masing dengan karakteristik dan basis pengikut yang berbeda. Pertama, ada tokoh publik atau selebritas yang telah memiliki pengikut besar sebelum terjun ke dunia politik. Mereka memanfaatkan popularitas mereka untuk menyuarakan pandangan politik atau mendukung kandidat tertentu²⁰. Kedua, muncul figur aktivis atau intelektual publik yang membangun reputasi mereka melalui analisis politik yang tajam dan sering viral di media sosial. Ketiga, ada juga influencer yang berasal dari kalangan jurnalis atau mantan jurnalis, yang memanfaatkan pengalaman dan jaringan mereka di dunia media untuk membentuk narasi politik²¹. Terakhir, tidak bisa diabaikan kehadiran influencer akar rumput, yang meskipun tidak memiliki latar belakang politik formal, berhasil membangun basis pengikut yang loyal melalui konten politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari²².

Dalam konteks golput, strategi dan narasi yang digunakan oleh influencer politik sangatlah beragam dan kompleks. Sebagian influencer mengambil pendekatan edukatif, berusaha menjelaskan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan dampak negatif dari golput terhadap demokrasi. Mereka sering menggunakan *storytelling* atau analogi sederhana untuk membuat konsep abstrak seperti hak pilih menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas²³. Di sisi lain, ada juga influencer yang justru mempromosikan golput sebagai bentuk protes politik yang sah. Mereka membangun narasi bahwa abstain dari pemilu adalah cara

¹⁷ Tetti Samosir, *Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*.

¹⁸ Arliman S, 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia'.

¹⁹ Yulianto, 'Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024'.

²⁰ Sugiono, 'Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia'.

²¹ Sugiono.

²² Sugiono.

²³ Yulianto, 'Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024'.



untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada²⁴. Strategi lain yang sering digunakan adalah menciptakan konten yang menghibur namun sarat pesan politik, seperti meme atau video pendek yang viral, untuk menarik perhatian audiens yang mungkin kurang tertarik dengan politik konvensional.



Gambar 1. Influencer Thariq Halilintar dalam kampanye bersama PIP

Dampak influencer terhadap persepsi pemilih tentang golput tidak bisa diremehkan. Melalui konten yang mereka bagikan, influencer mampu membentuk kerangka berpikir followers mereka tentang apa itu golput dan implikasinya. Beberapa influencer berhasil meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu, terutama di kalangan pemilih muda yang sebelumnya apatis. Namun, ada juga kasus di mana influencer justru memperkuat sikap skeptis terhadap proses demokrasi, yang berpotensi meningkatkan kecenderungan golput. Pengaruh ini semakin diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung menciptakan ruang gema, di mana pengguna lebih sering terpapar pada konten yang selaras dengan pandangan mereka sendiri²⁵.

Dinamika ini perlu dipahami lebih dalam, untuk itu kita bisa melihat beberapa studi kasus konkret. Salah satu contoh yang menarik adalah seorang influencer dengan latar belakang aktivis yang secara aktif mendorong partisipasi pemilu melalui kampanye #SuaraMuda²⁶. Melalui serangkaian video edukasi dan diskusi live di Instagram, ia berhasil menjangkau ribuan pemilih muda dan mengubah persepsi mereka tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Di sisi lain, ada juga kasus influencer yang, meskipun tidak secara eksplisit mendukung golput, sering memposting konten yang mempertanyakan integritas proses pemilu dan efektivitas

²⁴ Firman, 'Pengaruh Media Sosial (Instagram) Terhadap Keputusan Memilih Pada Pemilihan Umum Di Kota Malang Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi, Skripsi,, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.'

²⁵ Amalia, Esti, and Camil, 'THE INDUSTRY OF POLITICAL BUZZING IN INDONESIA AND ITS IMPACT ON SOCIAL MEDIA GOVERNANCE':

²⁶ Firman, 'Pengaruh Media Sosial (Instagram) Terhadap Keputusan Memilih Pada Pemilihan Umum Di Kota Malang Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi, Skripsi,, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.'

pemerintahan hasil pemilu²⁷. Konten semacam ini, meskipun tidak dimaksudkan untuk mendorong golput, berpotensi meningkatkan sikap apatis di kalangan pengikutnya.

Fenomena influencer politik dan dampaknya terhadap isu golput mencerminkan perubahan fundamental dalam cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan politik di era digital. Ini membawa tantangan baru bagi penyelenggara pemilu dan pendidikan politik, yang harus beradaptasi dengan lanskap media yang terus berubah²⁸. Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital'. Di satu sisi, influencer menawarkan peluang untuk menjangkau dan melibatkan segmen masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh metode komunikasi politik tradisional. Namun, di sisi lain, ada risiko penyebaran disinformasi dan polarisasi yang lebih besar.

Menghadapi realitas ini, diperlukan pendekatan yang lebih nuansir dalam memahami dan merespons peran influencer dalam diskursus politik, khususnya terkait isu golput. Ini mungkin melibatkan kolaborasi antara badan penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial untuk meningkatkan literasi digital dan politik di kalangan masyarakat²⁹. Selain itu, perlu ada dialog yang konstruktif antara pembuat kebijakan dan komunitas influencer untuk memastikan bahwa kekuatan media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk memperkuat, bukan melemahkan, proses demokrasi di Indonesia.

Pada akhirnya, fenomena influencer politik dan dampaknya terhadap isu golput adalah cerminan dari transformasi yang lebih luas dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Memahami dan mengelola dinamika ini dengan bijak akan menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan tangguh di era digital.

Buzzer

Dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, fenomena buzzer politik telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari dinamika komunikasi politik. Buzzer, yang dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang secara aktif dan terorganisir mempromosikan narasi tertentu di media sosial, telah mengubah cara informasi politik, termasuk isu golput, disebar dan diterima oleh masyarakat luas³⁰.

Karakteristik buzzer politik di Indonesia sangat beragam, namun memiliki beberapa ciri khas yang dapat diidentifikasi. Mereka umumnya beroperasi dalam kelompok terkoordinasi, sering kali dengan struktur hierarkis yang jelas³¹. Di puncak hierarki ini biasanya terdapat 'mastermind' yang merancang strategi dan narasi utama, sementara di level bawah terdapat sejumlah besar akun yang bertugas menyebarkan pesan-pesan yang telah ditentukan. Buzzer politik di Indonesia juga sering memanfaatkan identitas palsu atau akun anonim untuk melindungi identitas yang sebenarnya, sekaligus memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan lebih leluasa³². Modus operandi buzzer politik di Indonesia mencakup berbagai taktik yang canggih. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah koordinasi untuk membuat

²⁷ Sastramidjaja, Rasidi, and Elsitra, 'Peddling Secrecy in a Climate of Distrust: Buzzers, Rumours and Implications for Indonesia's 2024 Elections'.

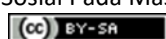
²⁸ Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital'.

²⁹ Candra, Fauzi, and Rahmadhani, 'Political Relations'.

³⁰ Putra, 'Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024'.

³¹ Yulianto, 'Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024'.

³² Hidayat, 'Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum'.



hashtag tertentu menjadi trending topic di platform seperti Twitter³³. Mereka juga kerap melakukan 'bombardir' komentar di postingan-postingan yang berpengaruh, baik untuk mendukung maupun menyerang narasi tertentu. Penggunaan meme, infografis, dan video pendek yang mudah viral juga menjadi alat yang efektif dalam arsenal mereka. Yang menarik, buzzer politik di Indonesia sering kali beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan algoritma media sosial, menunjukkan tingkat sofistikasi yang tinggi dalam operasi mereka.

Dalam konteks isu golput, penyebaran informasi dan disinformasi oleh buzzer menjadi fenomena yang kompleks dan multifaset. Di satu sisi, ada kelompok buzzer yang aktif menyebarkan informasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, menekankan bahwa golput adalah bentuk pengabaian terhadap hak dan kewajiban demokratis. Mereka sering menggunakan narasi patriotisme dan kewarganegaraan untuk mendorong partisipasi pemilih³⁴. Di sisi lain, terdapat pula buzzer yang justru mempromosikan golput, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka mungkin menyebarkan informasi yang meragukan integritas proses pemilu atau menekankan kekecewaan terhadap sistem politik yang ada.

Disinformasi terkait golput yang disebarkan oleh buzzer bisa mengambil berbagai bentuk. Ini bisa berupa manipulasi data tingkat partisipasi pemilih, penyebaran rumor tentang kecurangan sistematis dalam pemilu, atau bahkan narasi yang melebih-lebihkan dampak golput terhadap hasil pemilu. Taktik yang sering digunakan adalah menciptakan konten yang emosional dan provokatif, yang cenderung lebih mudah viral dibandingkan informasi faktual yang lebih nuansir³⁵. Pengaruh buzzer terhadap sentimen publik mengenai golput tidak bisa diremehkan. Melalui operasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, buzzer mampu membentuk persepsi publik secara signifikan. Mereka dapat menciptakan ilusi konsensus tentang isu golput, baik pro maupun kontra, yang dapat mempengaruhi sikap pemilih yang masih ragu. Dalam beberapa kasus, kampanye buzzer telah terbukti efektif dalam memobilisasi kelompok pemilih tertentu atau sebaliknya, mendorong sikap apatis terhadap proses pemilu³⁶.

³³ Nurul Jannah Lailatul Fitria, 'Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik'.

³⁴ Sugiono, 'Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia'.

³⁵ Sastramidjaja, Rasidi, and Elsitra, 'Peddling Secrecy in a Climate of Distrust: Buzzers, Rumours and Implications for Indonesia's 2024 Elections'.

³⁶ Anggraini and Ariesta, 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019', 2022.





Gabar 2. Tim buzzer dengan para pendukung Paslon Presiden 2024

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengaruh buzzer tidak selalu linear atau mudah diprediksi. Terkadang, kampanye buzzer yang terlalu agresif atau terlihat tidak otentik justru dapat memicu reaksi balik dari publik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis dalam menyikapi informasi yang mereka terima di media sosial.

Untuk memahami dinamika ini lebih konkret, kita bisa melihat beberapa studi kasus kampanye buzzer terkait golput. Salah satu contoh yang menarik adalah kampanye #SuaraMuPentingKok yang muncul menjelang pemilu terakhir. Kampanye ini, yang diduga digerakkan oleh jaringan buzzer pro-pemerintah, berusaha mendorong partisipasi pemilih dengan menekankan pentingnya setiap suara dalam demokrasi³⁷. Kampanye ini menggunakan kombinasi influencer populer, meme yang catchy, dan postingan yang terkoordinasi untuk menciptakan momentum di media sosial.

Di sisi lain, ada juga kasus kampanye *hashtag* #GolputAdalahHak yang muncul sebagai respons terhadap apa yang dianggap sebagai kekecewaan terhadap pilihan kandidat yang ada. Kampanye ini, yang diduga digerakkan oleh kelompok oposisi, menggunakan taktik serupa namun dengan narasi yang berbeda. Mereka menekankan bahwa golput adalah bentuk protes yang sah dan bahkan diperlukan untuk memperbaiki sistem politik. Kedua kampanye ini menunjukkan bagaimana buzzer dapat memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik tentang golput. Mereka tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga aktif dalam membingkai isu, menciptakan hashtag yang menarik, dan memobilisasi dukungan online³⁸.

³⁷ Hidayat, 'Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum'.

³⁸ Khalyubi and Perdana, 'Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia'.



Fenomena buzzer politik dan pengaruhnya terhadap isu golput mencerminkan perubahan fundamental dalam lanskap politik Indonesia di era digital. Ini menghadirkan tantangan baru bagi regulasi kampanye politik, pendidikan pemilih, dan upaya menjaga integritas proses demokrasi. Di satu sisi, buzzer menawarkan cara baru untuk melibatkan pemilih dan menyebarkan informasi politik. Namun, di sisi lain, mereka juga membawa risiko manipulasi opini publik dan penyebaran disinformasi yang dapat merusak kualitas diskursus demokratis.

Menghadapi realitas ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengelola dampak buzzer terhadap proses politik. Ini mungkin melibatkan kombinasi regulasi yang lebih ketat terhadap kampanye digital, peningkatan literasi media di kalangan masyarakat, dan kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memerangi disinformasi. Pada akhirnya, fenomena buzzer politik dan dampaknya terhadap isu golput adalah cerminan dari kompleksitas demokrasi Indonesia di era digital. Memahami dan mengelola dinamika ini dengan bijak akan menjadi kunci dalam membangun proses demokratis yang lebih tangguh, transparan, dan partisipatif di masa depan.

Pembahasan

Analisis Tren Golput Sebelum Dan Sesudah Era Media Sosial

Fenomena golput, atau golongan putih, telah menjadi bagian integral dari lanskap politik Indonesia sejak era Orde Baru. Namun, dinamika dan manifestasinya telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya era media sosial. Analisis trend golput sebelum dan sesudah era ini mengungkapkan pergeseran menarik dalam perilaku pemilih dan cara masyarakat berinteraksi dengan proses politik. Sebelum era media sosial, yang dapat kita tandai secara umum dimulai pada pertengahan 2000-an dengan popularisasi platform seperti Friendster dan kemudian Facebook di Indonesia, golput seringkali dipandang sebagai fenomena yang lebih pasif dan kurang terorganisir. Pada masa ini, keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu lebih banyak didorong oleh faktor-faktor seperti ketidaktahuan, apatis politik, atau kendala logistik dalam mengakses tempat pemungutan suara. Kampanye politik pada era ini lebih banyak mengandalkan media massa konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta interaksi langsung dengan pemilih melalui rapat umum atau kunjungan *door-to-door*. Hal ini membatasi jangkauan dan intensitas diskursus politik, terutama di kalangan pemilih muda dan di daerah-daerah terpencil.

Trend golput pada era pra-media sosial cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi. Angka golput biasanya berfluktuasi dalam rentang yang relatif sempit dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, dengan perubahan yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor makro seperti kondisi ekonomi atau stabilitas politik nasional³⁹. Pada masa ini, golput seringkali dilihat sebagai indikator kegagalan sistem dalam melibatkan pemilih, daripada sebagai bentuk protes politik yang aktif dan terorganisir. Namun, dengan hadirnya era media sosial, lanskap golput di Indonesia mengalami transformasi yang dramatis. Media sosial telah membuka ruang diskusi politik yang lebih luas, demokratis, dan tanpa batas geografis⁴⁰. Platform seperti Facebook, Twitter, dan kemudian Instagram telah menjadi arena baru bagi pertukaran ide

³⁹ Butar Butar et al., 'Analyzing Abstention Discourse in Presidential Elections'.

⁴⁰ Khalyubi and Perdana, 'Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia'.



politik, termasuk wacana tentang golput Candra, Fauzi, and Rahmadhani, 'Political Relations'.. Akibatnya, tren golput pasca era media sosial menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, volatile, dan multidimensi⁴¹.

Salah satu perubahan paling mencolok adalah munculnya "golput ideologis" yang lebih vokal dan terorganisir⁴². Melalui platform media sosial, individu dan kelompok yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu kini memiliki sarana untuk menyuarakan alasan dan motivasi mereka secara lebih luas⁴³. Hashtag dan kampanye daring yang mengadvokasi golput sebagai pilihan politik yang valid telah menjadi fenomena baru yang tidak ada padanannya di era sebelumnya⁴⁴. Misalnya, gerakan "#GolputAdalahHak" yang muncul menjelang pemilu 2019 mendapatkan momentum signifikan di media sosial, menciptakan diskusi publik yang intens tentang makna partisipasi politik dalam demokrasi⁴⁵.

Media sosial juga telah menjadi alat yang powerful bagi upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kampanye-kampanye kreatif yang menargetkan pemilih muda, seperti *hashtag* "#SayaPemilihMuda" atau "#MillennialVote", telah berhasil menarik minat kelompok demografis yang sebelumnya cenderung apatis terhadap politik⁴⁶. Penggunaan influencer, konten viral, dan meme politik telah menjadi strategi baru dalam edukasi politik dan mobilisasi pemilih. Ini menciptakan dinamika menarik di mana, meskipun wacana golput mungkin lebih vokal di media sosial, pada kenyataannya tingkat partisipasi pemilih di beberapa pemilu terakhir justru menunjukkan tren peningkatan.

Fluktuasi angka golput di era media sosial juga cenderung lebih dramatis dan sulit diprediksi Candra, Fauzi, and Rahmadhani.. Sentimen publik yang dapat berubah dengan cepat akibat viral-nya isu tertentu di media sosial dapat mempengaruhi keputusan pemilih hingga detik-detik terakhir menjelang pemilu⁴⁷. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi pollster dan analis politik dalam memprediksi perilaku pemilih. Misalnya, viralnya video atau meme politik tertentu bisa memicu perubahan sikap pemilih dalam hitungan jam, sesuatu yang jarang terjadi di era pra-media sosial.

Menarik untuk dicatat adalah pergeseran dalam karakteristik golput di era media sosial. Jika sebelumnya golput lebih banyak diasosiasikan dengan kelompok masyarakat berpendidikan rendah atau yang tinggal di daerah terpencil, kini golput juga menjadi fenomena yang signifikan di kalangan masyarakat urban yang teredukasi dan aktif di media sosial. Ini menunjukkan bahwa motivasi di balik golput telah berkembang dari sekadar masalah akses atau pengetahuan menjadi bentuk ekspresi politik yang lebih kompleks, termasuk sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang ada⁴⁸. Media sosial juga telah mengubah cara golput dipersepsikan dan didiskusikan dalam wacana publik. Sebelum era media sosial, diskusi

⁴¹ Yulianto, 'Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024'.

⁴² Anggraini and Ariesta, 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019', 2022.

⁴³ Santoso, *New Media & Komunikasi Politik*.

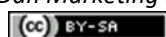
⁴⁴ Nurul Jannah Lailatul Fitria, 'Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik'.

⁴⁵ Candra, Fauzi, and Rahmadhani, 'Political Relations'.

⁴⁶ Sastramidjaja, Rasidi, and Elsitra, 'Peddling Secrecy in a Climate of Distrust: Buzzers, Rumours and Implications for Indonesia's 2024 Elections'.

⁴⁷ Sihombing, Sungkar, and Harijanti, 'MAKNA KERUGIAN POTENSIAL SEBAGAI KUALIFIKASI LEGAL STANDING'.

⁴⁸ Ahmad et al., *Manajemen Komunikasi Politik Dan Marketing Politik*.



tentang golput cenderung terbatas pada lingkaran akademis atau aktivis politik. Kini, topik ini menjadi bahan perdebatan publik yang luas, dengan berbagai perspektif yang saling beradu di platform digital. Hal ini telah membawa isu golput dari pinggiran ke tengah diskursus politik nasional, memaksa politisi dan pembuat kebijakan untuk merespons fenomena ini dengan lebih serius.

Lebih jauh lagi, era media sosial telah menciptakan bentuk-bentuk partisipasi politik baru yang berada di luar kerangka formal pemilihan umum. "Slacktivism" atau aktivisme daring yang *low-effort* seperti menandatangani petisi online atau menyebarkan hashtag, telah menjadi alternatif bagi mereka yang merasa tidak puas dengan saluran partisipasi politik konvensional⁴⁹. Fenomena ini menambah kompleksitas dalam memahami dan mengukur tingkat golput di era digital, karena batas antara partisipasi dan non-partisipasi politik menjadi semakin kabur.

Analisis trend golput sebelum dan sesudah era media sosial juga mengungkapkan perubahan dalam strategi kampanye anti-golput Candra, Fauzi, and Rahmadhani.. Jika sebelumnya kampanye ini lebih banyak mengandalkan slogan-slogan umum tentang kewajiban warga negara, di era media sosial strategi ini telah berevolusi menjadi lebih personal dan interaktif. Penggunaan influencer, konten viral, dan kampanye yang disesuaikan dengan karakteristik platform media sosial tertentu telah menjadi norma baru dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, penggunaan filter Instagram atau *challenge* TikTok untuk mempromosikan partisipasi pemilu adalah fenomena yang khas era media sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun media sosial telah mengubah lanskap golput secara signifikan, faktor-faktor fundamental yang mendorong perilaku golput tetap relevan. Isu-isu seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, atau kurangnya pilihan kandidat yang menarik tetap menjadi pendorong utama golput, baik di era sebelum maupun sesudah media sosial. Yang berubah adalah cara isu-isu ini diartikulasikan, disebar, dan direspons oleh masyarakat luas.

Maka berdasarkan analisis tren golput sebelum dan sesudah era media sosial menunjukkan transformasi yang kompleks dalam perilaku politik masyarakat Indonesia. Media sosial telah membuka ruang baru bagi ekspresi politik, termasuk dalam konteks golput, namun juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga integritas proses demokrasi. Fenomena ini telah mengubah golput dari sekadar indikator pasif ketidakpuasan menjadi bentuk ekspresi politik yang lebih aktif dan beragam. Memahami dinamika ini menjadi krusial bagi para pemangku kepentingan politik, mulai dari penyelenggara pemilu hingga aktivis demokrasi, dalam upaya membangun sistem politik yang lebih responsif dan partisipatif di era digital. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan potensi media sosial untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik, sambil memitigasi risiko polarisasi dan disinformasi yang dapat mengancam kesehatan demokrasi Indonesia.

Korelasi Antara Aktivitas Influencer/Buzzer Dengan Tingkat Golput

Dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, fenomena influencer dan buzzer telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari dinamika komunikasi politik. Kehadiran mereka

⁴⁹ Candra, Fauzi, and Rahmadhani, 'Political Relations'.



telah mengubah cara informasi politik disebarkan dan diterima oleh masyarakat, termasuk dalam isu sensitif seperti golput atau golongan putih. Menariknya, terdapat korelasi yang kompleks antara aktivitas influencer/buzzer dengan tingkat golput yang teramati dalam beberapa pemilihan umum terakhir⁵⁰.

Influencer politik, yang seringkali merupakan tokoh publik atau figur dengan pengikut yang besar di media sosial, memiliki kemampuan untuk membentuk opini dan mempengaruhi perilaku pengikut mereka. Di sisi lain, buzzer politik beroperasi dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis, seringkali menggunakan taktik seperti trending hashtag atau menyebarkan meme untuk memviralkan pesan-pesan politik tertentu. Kedua kelompok ini memainkan peran signifikan dalam membentuk narasi seputar partisipasi politik dan golput. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa intensitas aktivitas influencer dan buzzer cenderung meningkat menjelang pemilihan umum⁵¹. Kampanye-kampanye digital yang mereka lakukan dapat berdampak pada tingkat golput dengan cara yang beragam⁵². Di satu sisi, influencer dan buzzer yang aktif mempromosikan pentingnya partisipasi politik dapat mendorong antusiasme pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial. Mereka seringkali menggunakan pendekatan kreatif dan relatable untuk menyampaikan pesan politik, seperti melalui challenge TikTok atau Instagram story yang menarik.

Korelasi antara aktivitas influencer/buzzer dengan tingkat golput tidak selalu bersifat linear atau positif. Dalam beberapa kasus, kampanye yang terlalu agresif atau terlihat tidak otentik justru dapat memicu reaksi negatif dari publik. Fenomena "influencer fatigue" atau kelelahan terhadap konten politik yang berlebihan di media sosial dapat mendorong sebagian orang untuk bersikap apatis atau bahkan memilih golput sebagai bentuk protes. Lebih jauh lagi, polarisasi yang sering terjadi akibat pertarungan narasi antara kubu-kubu politik di media sosial juga dapat berkontribusi pada peningkatan golput. Ketika debat politik online menjadi terlalu toxic atau penuh dengan ujaran kebencian, sebagian masyarakat mungkin memilih untuk menarik diri dari proses politik sebagai bentuk *self-preservation*.

Di sisi lain, aktivitas buzzer yang menyebarkan disinformasi atau narasi negatif tentang proses pemilu dapat meningkatkan skeptisisme publik dan berpotensi mendorong golput. Misalnya, narasi tentang kecurangan sistematis dalam pemilu atau ketidakefektifan suara individu dalam mempengaruhi hasil akhir dapat mematahkan semangat partisipasi politik. Menariknya, beberapa studi menunjukkan bahwa pengaruh influencer dan buzzer terhadap tingkat golput cenderung lebih signifikan di daerah perkotaan dan di kalangan pemilih muda. Ini mungkin disebabkan oleh tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, di daerah pedesaan atau pada kelompok usia yang lebih tua, faktor-faktor tradisional, seperti mobilisasi akar rumput dan kampanye tatap muka masih memainkan peran yang lebih dominan.

⁵⁰ Sihombing, Sungkar, and Harijanti, 'MAKNA KERUGIAN POTENSIAL SEBAGAI KUALIFIKASI LEGAL STANDING'.

⁵¹ Anggraini and Ariesta, 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019', 2022.

⁵² Jamaludin Ghafur, 'Peran Partai Politik Dalam Pemilu (Telaah Atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Dan Rekrutmen Politik)'.



Penting juga untuk mencatat bahwa korelasi antara aktivitas influencer/buzzer dengan tingkat golput dapat bervariasi tergantung pada jenis pemilihan. Misalnya, dalam pemilihan presiden yang biasanya menarik perhatian nasional, pengaruh influencer dan buzzer mungkin lebih terasa dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota. Fenomena ini juga telah mendorong perubahan dalam strategi kampanye politik. Partai politik dan kandidat kini semakin mengandalkan influencer dan buzzer sebagai bagian integral dari tim kampanye digital mereka. Mereka tidak hanya fokus pada pesan-pesan untuk mendorong partisipasi, tetapi juga aktif dalam melawan narasi pro-golput yang mungkin disebarkan oleh pihak lawan.

Namun, korelasi antara aktivitas influencer/buzzer dengan tingkat golput bukanlah hubungan sebab-akibat yang sederhana. Banyak faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau abstain dalam pemilu, seperti kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan politik, dan kepercayaan terhadap sistem pemilu. Aktivitas influencer dan buzzer hanyalah salah satu variabel dalam ekosistem yang kompleks ini.

Tantangan selanjutnya bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan politik lainnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi influencer dan buzzer untuk meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas, sambil memitigasi risiko disinformasi dan polarisasi yang dapat kontraproduktif. Diperlukan pendekatan yang lebih nuansir dalam memahami dan merespons dinamika ini, termasuk upaya untuk meningkatkan literasi digital dan politik di kalangan masyarakat luas.

Pada akhirnya, korelasi antara aktivitas influencer/buzzer dengan tingkat golput mencerminkan perubahan fundamental dalam cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan politik di era digital. Memahami dan mengelola dinamika ini dengan bijak akan menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan tangguh menghadapi tantangan abad ke-21.

Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Keputusan Golput

Keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau yang sering disebut sebagai golput, merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh beragam faktor Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Indonesia*.. Meski pengaruh media sosial dan aktivitas influencer atau buzzer semakin menonjol, ada banyak elemen lain yang turut berperan dalam membentuk sikap golput di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang paling mendasar adalah tingkat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak benar-benar berpengaruh atau bahwa sistem yang ada tidak mampu membawa perubahan yang diharapkan, kecenderungan untuk golput meningkat. Pengalaman dengan korupsi, nepotisme, atau ketidakefektifan pemerintah dalam menangani masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat mengikis kepercayaan ini secara signifikan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas kandidat atau pilihan politik yang tersedia Basuki Kurniawan.. Seringkali, pemilih merasa bahwa tidak ada kandidat yang benar-benar mewakili aspirasi mereka atau memberikan solusi konkret atas permasalahan yang mereka hadapi. Situasi di mana pemilih merasa harus memilih "pilihan yang kurang buruk" daripada kandidat yang benar-benar mereka dukung dapat mendorong keputusan untuk golput.



Tingkat pendidikan politik dan pemahaman tentang sistem demokrasi juga memainkan peran krusial⁵³. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi politik atau tidak mengerti bagaimana sistem pemilu bekerja mungkin merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi. Di sisi lain, mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik justru bisa memilih golput sebagai bentuk protes yang disengaja terhadap sistem yang mereka anggap cacat.

Kondisi sosial ekonomi pemilih tidak bisa diabaikan dalam analisis ini. Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berjuang dengan kemiskinan atau kesulitan ekonomi, urusan politik mungkin terasa jauh dari prioritas sehari-hari mereka. Energi dan waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pemilu mungkin dianggap sebagai kemewahan yang tidak terjangkau ketika fokus utama adalah bertahan hidup. Faktor geografis dan infrastruktur juga berperan penting, terutama di negara seluas dan beragam seperti Indonesia. Di daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau kecil, akses ke tempat pemungutan suara bisa menjadi tantangan tersendiri. Ketika biaya dan usaha untuk memberikan suara melebihi manfaat yang dirasakan, golput menjadi pilihan yang lebih praktis bagi sebagian orang.

Pengaruh lingkungan sosial dan keluarga tidak bisa diremehkan. Di komunitas di mana partisipasi politik rendah atau ada sikap skeptis terhadap pemerintah, individu cenderung mengadopsi sikap serupa. Sebaliknya, di lingkungan yang menghargai partisipasi politik, tekanan sosial untuk berpartisipasi dalam pemilu bisa sangat kuat. Faktor psikologis seperti apatis politik atau kelelahan terhadap proses demokrasi juga berkontribusi pada keputusan golput. Setelah beberapa kali pemilu yang mungkin tidak membawa perubahan signifikan, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh dan memutuskan bahwa partisipasi mereka tidak lagi berarti.

Isu-isu spesifik yang muncul menjelang pemilu juga dapat mempengaruhi tingkat golput. Misalnya, kontroversi seputar proses pendaftaran pemilih, kasus-kasus kecurangan yang terungkap, atau kebijakan kontroversial yang diambil menjelang pemilu dapat menurunkan antusiasme pemilih. Peran media massa tradisional, meski sering terbayangi oleh media sosial, tetap signifikan. Cara media membingkai isu-isu politik dan pemilu dapat membentuk persepsi publik tentang pentingnya partisipasi mereka. Liputan yang berlebihan tentang konflik politik atau skandal dapat menimbulkan kejenuhan dan sinisme di kalangan pemilih.

Terakhir, faktor teknis seperti kerumitan prosedur pemilihan atau masalah dalam distribusi surat suara juga dapat berkontribusi pada tingkat golput. Ketika proses memberikan suara dianggap terlalu merepotkan atau membingungkan, sebagian pemilih mungkin memutuskan untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Memahami kompleksitas faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada kampanye di media sosial, tetapi juga menysasar akar permasalahan seperti peningkatan kepercayaan publik, perbaikan sistem politik, dan edukasi pemilih, diperlukan untuk mengatasi fenomena golput secara berkelanjutan. Hanya dengan memahami dan mengatasi berbagai faktor ini secara komprehensif, kita dapat berharap untuk membangun demokrasi yang lebih partisipatif dan representatif di Indonesia

⁵³ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*.



Implikasi Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia

Fenomena golput dan peran influencer serta buzzer dalam lanskap politik Indonesia memiliki implikasi mendalam terhadap kualitas demokrasi negara ini. Pergeseran dinamika partisipasi politik yang terjadi mencerminkan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan sistem demokratis di era digital. Kehadiran influencer dan buzzer telah mengubah cara informasi politik disebarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Di satu sisi, ini membuka ruang bagi diskusi politik yang lebih luas dan aksesibel, terutama bagi generasi muda yang aktif di media sosial. Kemudahan akses informasi ini berpotensi meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi.

Namun, fenomena ini juga membawa risiko polarisasi yang lebih tajam dalam masyarakat. Algoritma media sosial yang cenderung menciptakan ruang gema⁵⁴, memperkuat pandangan yang sudah ada dan mempersulit dialog antar kelompok dengan pandangan berbeda. Akibatnya, kualitas diskursus politik bisa menurun, digantikan oleh perdebatan yang lebih emosional dan kurang substansial. Bahkan dengan meningkatnya peran influencer dan buzzer dalam membentuk opini publik menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan kedalaman partisipasi politik masyarakat. Apakah keputusan politik yang diambil benar-benar mencerminkan pemahaman dan keyakinan pribadi, atau sekadar hasil dari paparan terus-menerus terhadap narasi tertentu di media sosial? Ini menjadi tantangan bagi kualitas demokrasi deliberatif yang mengandalkan diskusi rasional dan pertimbangan mendalam dari warga negara.

Fenomena golput sendiri memiliki implikasi ganda terhadap kualitas demokrasi. Di satu sisi, tingginya angka golput bisa dilihat sebagai sinyal bahwa sistem politik yang ada gagal merespons aspirasi dan kebutuhan sebagian masyarakat. Ini bisa menjadi dorongan bagi elit politik untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Di sisi lain, jika golput mencapai level yang terlalu tinggi, legitimasi hasil pemilu dan pemerintahan yang terbentuk bisa dipertanyakan, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas politik.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi manipulasi opini publik melalui kampanye terorganisir di media sosial. Kemampuan buzzer untuk menciptakan trending topic atau menyebarkan narasi tertentu dengan cepat bisa mengaburkan batas antara opini publik yang organik dengan yang direkayasa. Ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Namun, di tengah tantangan-tantangan ini, ada juga potensi positif yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia⁵⁵. Kemampuan media sosial untuk menjangkau audiens yang luas bisa digunakan untuk meningkatkan literasi politik dan mendorong partisipasi yang lebih bermakna. Influencer dengan integritas tinggi bisa menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengedukasi dan memobilisasi pemilih, terutama generasi muda.

Oleh karena itu fenomena ini mendorong perlunya redefinisi konsep partisipasi politik di era digital. Bentuk-bentuk keterlibatan baru seperti aktivisme daring atau diskusi politik di

⁵⁴ Anggraini and Ariesta, 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019', 2022.

⁵⁵ Putri et al., 'INDONESIA'S DEMOCRACY AND CONSTITUTION'.



media sosial perlu diakui dan diakomodasi dalam sistem demokrasi. Ini bisa membuka jalan bagi inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Tantangan ke depan bagi demokrasi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi positif dari dinamika baru ini sambil memitigasi risikonya. Ini mungkin melibatkan pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap realitas media sosial, peningkatan program literasi digital dan politik, serta penciptaan platform-platform yang mendorong dialog konstruktif antar berbagai elemen masyarakat.

Kualitas demokrasi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan - mulai dari pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, hingga warga negara - untuk bernavigasi dalam lanskap politik yang terus berubah ini. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur pemilihan, tetapi juga tentang membangun budaya politik yang sehat, kritis, dan partisipatif. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan-tantangan ini bisa diubah menjadi peluang untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Melalui dialog yang inklusif, edukasi yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap dinamika baru, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan model demokrasi yang lebih tangguh dan relevan di era digital, yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa ini dapat disimpulkan bahwa influencer dan buzzer memiliki peran ibarat dua sisi mata uang, kehadiran influencer dan buzzer membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, mereka dapat menjadi corong informasi yang edukatif tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Namun di sisi lain, tak jarang mereka justru menjadi katalis yang mempercepat laju keengganan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini bagaikan sebuah tarian kompleks, di mana setiap gerakan influencer dan buzzer dapat mengubah irama partisipasi pemilih. Masyarakat, yang kini semakin kritis dan skeptis, menjadi penonton yang jeli - siap menyerap atau menolak informasi yang mereka terima. Dalam panggung demokrasi Indonesia yang terus berevolusi, eksistensi influencer dan buzzer telah menjadi variabel penting yang tak bisa diabaikan dalam memahami dinamika golput pada masa pemilu

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nyarwi, Aminullah Sibly, Faizah Sa, and Penata Letak. *Manajemen Komunikasi Politik Dan Marketing Politik*. Cetakan 1. Sleman, Yogyakarta, 2012.
- Al-Fatih, Sholahuddin, and Zaka Aditya. 'Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System'. In *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. Sidoarjo, Indonesia: EAI, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286165>.
- Amalia, Dr Mirta, Klara Esti, and Mohammad Rinaldi Camil. 'THE INDUSTRY OF POLITICAL BUZZING IN INDONESIA AND ITS IMPACT ON SOCIAL MEDIA GOVERNANCE': *University of Manchester* 1, no. 1 (2019): 173–99.



- Anggraini, Devianti, and Aang Wahyu Ariesta. 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019' 11, no. 1 (2022).
- . 'PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019' 11, no. 1 (2022).
- Arliman S, Laurensius. 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia'. *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (8 May 2018): 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Astuti, Ngudi, and Ida Zubaedah. 'KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA'RUF' 22 (n.d.).
- Basuki Kurniawan. *Politik Hukum Indonesia*. 1st ed. Jawa Timur: Penerbit LICENSI, 2020.
- Butar Butar, Jayadi, Sofian Lusa, Sutia Handayani, and Andi Akram Yusuf. 'Analyzing Abstention Discourse in Presidential Elections: Knowledge Discovery in X Using ML, LDA and SNA'. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 14, no. 3 (27 June 2024): 1144–51. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.14.3.19402>.
- Candra, Ade, Anwar Fauzi, and Marissa Laila Rahmadhani. 'Political Relations: Political Identity and Social Media in Elections in Indonesia'. *Kybernology: Journal of Government Studies* 3, no. 2 (15 November 2023): 111–28. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v3i2.13054>.
- Firman, Nur Wahyudi. 'Pengaruh Media Sosial (Instagram) Terhadap Keputusan Memilih Pada Pemilihan Umum Di Kota Malang Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi, Skripsi,, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.' Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Hatta, Muhammad. 'The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences'. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 03 (18 February 2020): 1750–60. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200924>.
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. 'Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum'. 'ADALAH 4, no. 2 (10 May 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15606>.
- Hotma Pardomuan Sibuea. *Politik Hukum*. Jakarta: Krakatau Book, 2010.
- Jamaludin Ghafur. 'Peran Partai Politik Dalam Pemilu (Telaah Atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Dan Rekrutmen Politik)'. In *Menyongsong Pemilu Serentak 2024*. Yogyakarta, 2022.
- Julianja, Sufiana. 'Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' 6 (2018).
- Khalyubi, Wildhan, and Aditya Perdana. 'Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia'. *Journal of Government and Political Issues* 1, no. 2 (20 November 2021). <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.17>.



- Nasution, Latipah. 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital'. *'ADALAH* 4, no. 3 (25 June 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Nurul Jannah Lailatul Fitria. 'Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik'. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (22 January 2023): 57–69. <https://doi.org/10.32734/politeia.v15i1.8724>.
- Putra, Ariandi. 'Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024'. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (29 July 2023): 1143–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34076>.
- Putri, Ria Wierma, Febryani Sabatira, Orima Melati Davey, Muhammad Febriyan Saputra, and Rudi Natamiharja. 'INDONESIA'S DEMOCRACY AND CONSTITUTION: REFLECTING HUMAN RIGHTS BASED ON PANCASILA'. *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 2 (1 January 2023): 100. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>.
- R. Dhanny Susetyawidianta and Galang Geraldy. 'Political Branding Prabowo - Gibran Dalam Pemilu Presiden 2024: Analisa Interaksionisme Simbolik Di Media Sosial Instagram Dan Twitter'. *Jurnal Ilmiah Kajian Komunikasi* 3, no. 1 (2024): 114–39.
- Rizki, Tabah, and Sindhunata Kurniawan. 'Public Service Performance: An Influence of Female Leadership and Good Governance'. *Jurnal Bina Praja* 15, no. 3 (December 2023): 443–52. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.443-452>.
- Santoso, Didik Haryadi. *New Media & Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Mbridge Press, 2018.
- Sastramidjaja, Yatun, Pradipa P Rasidi, and Gita N Elsitra. 'Peddling Secrecy in a Climate of Distrust: Buzzers, Rumours and Implications for Indonesia's 2024 Elections', no. 2022 (2022).
- Sihombing, Putrida, Lailani Sungkar, and Susi Dwi Harijanti. 'MAKNA KERUGIAN POTENSIAL SEBAGAI KUALIFIKASI LEGAL STANDING: ANALISIS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILU'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (30 September 2021): 1–18. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.318>.
- Sonata, Depri Liber. 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM'. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sugiono, Shiddiq. 'Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media'. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 4, no. 1 (13 June 2020): 47–66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.
- Tetti Samosir. *Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Pancasila, 2023.
- Wisnaeni, Fifiana, and Ratna Herawati. 'The Politics of Law of Pancasila-Based Democracy in Indonesia as the World's Third Largest Democracy'. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 4 (10 July 2020): 39. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0059>.
- Yulianto, Hermawan. 'Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (1 June 2023): 163–68. <https://doi.org/10.59000/jim.v2i1.107>.

